

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditya, Umi Rozah. 2015. *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Amzah, Amirul Faqih. 2021. *Kebebasan Hakim Dalam Sanksi Pidana Minimum Khusus*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arbijoto. 2010. *Kebebasan Hakim: Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Diadit Media.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Atmadja, I Dewa Gede, dan Budiarta, I Nyoman Putu. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Barama, Michael. 2015. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Unsrat Press.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddie O. S. 2019. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Kamil, Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Media.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2011. *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Lubis, Fauziah. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Marzuki, Suparman. 2017. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Munandar, Aris. 2019. *Narkotika, Prinsip Penjatuhan Pidana, dan Ketentuan Pidana Minimum Khusus (Suatu Kajian Teoritis, Normatif, dan Kasuistik)*. Gresik: Jendela Sastra Indonesia.
- Shaliah, Fithriatus. 2019. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Sinaga, Dahlan. 2017. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Sofyan, Andi, dan Azisa, Nur. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sriwidodo, Joko. 2023. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Studi Perilaku Hukum Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sulistiyono, Adi, dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Depok: Prenadamedia Group.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2020. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Wirogioto, Ali Johardi. 2022. *Hukum Pidana*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Di Bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1076).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 643).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/Majelis Dalam Menangani Perkara.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. Jurnal

- Adonara, Firman Floranta. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Sebagai Amanat Konstitusi (*Prinsiples of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate*). *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 No. 2, 217-236. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222/61>.
- Hutahaean, Armunanto, dan Agustina, Dina. (2023). Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Jakarta. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Vol. 9 No. 2, 178-191. Diakses dari <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/214>.
- Lengkong, Lonna Yohanes. (2020). Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Vol. 6 No. 3, 319-328. Diakses dari <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2634/1715>.
- Santi, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., dan Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di

Kabupaten Buleleng. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2 No. 3, 216-226. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/28786/16267/0>.

Situmeang, Tomson. (2022). Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Honeste Vivere*. Vol. 32 No. 2, 108-122. Diakses dari <https://ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/138/36>.

Suariawan, I G., Dewi, A. A. S. L., dan Suryani, L. P. (2022). Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 3 No. 2, 444-449. Diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4854>.

Viandro, Mahfin Gianjar, dan Purwanto, Gunawan Hadi. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2021/PN.Bjo). *Justitiable Universitas Bojonegoro*. Vol. 5 No. 2, 1-15. Diakses dari <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/download/544/399/>.

D. Internet

Ananda. (2021). Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Gramedia Blog. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

Badan Narkotika Nasional. (2019, Mei). Jenis-Jenis dan Penggolongan Narkotika. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan. Diakses dari <https://pasuruankab.bnn.go.id/jenis-jenis-dan-penggolongan-narkoba/>.

Badan Narkotika Nasional. (2020, Agustus). Apa itu Narkoba dan Jenisnya. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan. Diakses dari <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/>.

Badan Narkotika Nasional. (2022, September). Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Diakses dari <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>.

Hadi, Ilham. (2012, Desember). Mengenai Hukuman Tutupan. Hukum online. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-tutupan-lt50c2ee2cbcf46/>.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023, September). Dukong Rehabilitasi Pecandu Narkoba Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara. Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung+Rehabilitasi+Pecandu+Narkoba+di+Rindam%2C+Puan%3A+Bisa+Dibarengi+dengan+Program+Bela+Negara>.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Rap, pada tanggal 12 September 2023.

